

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana mundurnya Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia mungkin bukanlah sesuatu yang baru bagi sebagian orang, khususnya masyarakat Malaysia. Namun, belakangan ini berita pengunduran tersebut tiba-tiba menjadi sesuatu besar yang mengejutkan banyak orang, lantaran Mahathir mempercepat proses pengunduran dirinya. Skripsi ini akan mencari tahu dan menjelaskan, alasan mengapa Mahathir mempercepat proses pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia sebelum habis waktu jabatannya. Konsep politik dan konsep konflik akan menjadi kerangka dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan teknik pengumpulan data kualitatif, skripsi ini akan menggunakan sumber-sumber berupa data sekunder seperti; jurnal, berita, dsb. Kemudian temuan-temuan tersebut akan dijelaskan secara deskriptif untuk mengetahui alasan Mahathir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sistematika penulisan yang skripsi ini akan diawali dengan pendahuluan hingga bagian akhir adalah kesimpulan sebagai bahan pemuktian hipotesa.

A. Latar Belakang

Negara, adalah sebuah unit kesatuan yang terdiri dari berbagai macam komponen penyusun yang diakui secara internasional bahwa setiap satu bagian dari komponen itu adalah syarat mutlak untuk terbentuknya sebuah negara secara sah dan berdaulat, yaitu; masyarakat, wilayah, kedaulatan, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Kelima syarat itu, adalah syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap calon negara untuk menjadi negara yang berdaulat dan merdeka, tidak dapat dikurangi maupun ditawar.

Dari sekian banyaknya cara untuk menyelenggarakan pemerintahan, “negara” adalah satu dari sekian banyaknya cara tersebut, demi terbentuknya sebuah jalan untuk mencapai satu atau banyaknya tujuan. Dengan berdirinya sebuah negara, komunitas elit dapat mengatur komunitas-komunitas lain dibawahnya dengan mudah, karena negara adalah sebuah organisasi yang mengeluarkan, mengesahkan, serta memberlakukan aturan-aturan kepada masyarakatnya secara mengikat dan memaksa.

Menurut Aristoteles, “Negara adalah semacam masyarakat, dan setiap masyarakat memiliki tujuan kebaikan. Namun, jika setiap masyarakat memiliki tujuan kebaikan, maka negara atau komunitas politik adalah yang berkedudukan paling tinggi, yang merangkul semua masyarakat, dan mengacu kepada kebaikan yang tertinggi.”

Fitrahnya, sebuah negara dibentuk untuk mengayomi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di dalamnya, walaupun pada proses pelaksanaan dan penggunaan negara tersebut tidak selalu sejalan dengan kaidah dasar mengapa negara dibentuk (Deth, 2016).

Dalam penyelenggaraannya, negara membutuhkan seseorang atau beberapa orang pemimpin untuk mengatur jalannya proses pemerintahan. Para pemimpin-pemimpin tersebut yang nantinya akan mengatur bagaimana jalannya pemerintahan sebuah negara. Mulai dari menentukan bagaimana jalannya pembangunan hingga kebijakan apa yang akan dikeluarkan negara tersebut untuk merespon berbagai fenomena yang menimpa atau berkaitan dengan negara tersebut. Dalam implementasinya, bentuk kepemimpinan atas sebuah negara dapat berbeda-beda, tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara. Baik presidensial, parlemener, semi-presidensial, dll semua memiliki bentuk kepemimpinannya masing-masing. Perdana menteri, menjadi salah satu bentuk kepemimpinan yang ada pada dunia modern saat ini.

Perdana menteri biasa memimpin sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk parlementer atau semi-presidensial. Cara pemilihan perdana menteri juga berbagai macam bentuknya. Ada negara yang menggunakan

suara mayoritas parlemen untuk menentukan perdana menteri, ada juga yang menggunakan cara demokratis seperti pemilu untuk menentukan, dan dalam beberapa kasus ada perdana menteri yang mendapatkan jabatan karena ditunjuk langsung oleh kepala negara seperti raja. Dalam pelaksanaan tugasnya, perdana menteri memiliki wewenang hampir serupa dengan presiden. Perdana menteri memiliki wewenang untuk membentuk kabinet, mengatur jalannya pemerintahan, serta menentukan arah kebijakan dalam negeri dan luar negeri sebuah negara.

Masa jabatan perdana menteri di berbagai negara memiliki jangka waktunya masing-masing, tergantung dari kebijakan serta hukum yang berlaku pada negara setiap negara. Di Jepang, masa jabatan seorang perdana menteri kurang lebih adalah empat tahun, meskipun perdana menteri tersebut dapat kembali menjabat pada periode selanjutnya apabila mendapatkan wewenang. Sedangkan, di Singapura masa jabatan perdana menteri kurang lebih adalah lima tahun. Sama seperti di Jepang, perdana menteri Singapura yang pernah menjabat juga dapat kembali memimpin negara tersebut pada periode selanjutnya atau beberapa periode selanjutnya apabila dia mendapatkan wewenang.

Setelah masa jabatan perdana menteri habis, biasanya perdana menteri memiliki kewajiban untuk membubarkan

kabinet yang telah dia bentuk sebelumnya, untuk digantikan dengan susunan kabinet yang baru pada periode selanjutnya. Namun, tidak semua perdana menteri selalu berhasil menyelesaikan tugas mereka hingga akhir masa jabatan yang sudah ditetapkan. Beberapa menteri bahkan sengaja mengundurkan diri dari jabatannya karena berbagai macam alasan. Sebagai contoh ; Theresa May, Mantan Perdana Menteri Inggris yang mengundurkan diri dengan alasan bahwa dirinya gagal membuat Parlemen Inggris menyetujui Brexit (Theresa May: PM Inggris Akan Mundur Karena Tak Mampu Mewujudkan Brexit, 2019). Kemudian ada Shinzo Abe, Mantan Perdana Menteri Jepang yang mengundurkan diri pada bulan Agustus 2020 karena alasan kesehatan (PM Jepang Shinzo Abe Resmi Mundur Dari Jabatan Karena Alasan Kesehatan, 2020).

Berbicara mengenai pengunduran diri seorang perdana menteri, pada awal tahun 2020 Perdana Menteri Malaysia, yaitu Mahathir Mohamad juga megundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang Perdana Menteri. Mahathir adalah seseorang yang berjasa bagi Malaysia. Dengan manajemen negara yang diterapkannya, Mahathir berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi malaysia secara pesat. Tidak hanya sampai disitu, di bawah kepemimpinan Mahathir, Malaysia juga mengalami pembangunan negara yang begitu pesat

(Mahathir Mohamad Biography, 2020). Pada senin, 24 Februari 2020, Mahathir mengirim surat kepada Raja Malaysia (Yang Dipertuan Agung), surat tersebut berisikan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Beberapa jam kemudian, Raja Malaysia merespon surat tersebut dengan memberikan Mahathir persetujuan untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang Perdana Menteri. Namun, bersamaan dengan persetujuan tersebut, Raja Malaysia memberikan syarat bahwa setelah Mahathir mengundurkan diri, Mahathir harus menjadi seorang Perdana Menteri Interim (Perdana Menteri sementara) hingga seorang Perdana Menteri yang baru terpilih (Rasfan/AFP, 2020).

Awalnya, Mahathir berhasil mendapatkan kursi sebagai Perdana Menteri setelah koalisinya (*Pakatan Harapan*) berhasil mengalahkan koalisi oposisi (*Persatuan Nasional*) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak pada pemilu Malaysia 9 Mei 2018. Bersama dengan koalisinya, Mahathir, berhasil memperoleh mayoritas kursi di parlemen yang membuat Mahathir berhasil menjadi seorang Perdana Menteri. Namun, langkah pengunduran diri yang diambil Mahathir, seketika langsung mengguncang konstelasi politik Malaysia karena keputusan Mahathir tersebut dianggap begitu kontroversial dan tidak

terduga. Bahkan, *Koalisi Pakatan Harapan* yang menaungi Mahathir juga menjadi semakin goyah karena keputusan yang diambil oleh Mahathir. Setelah sebelumnya koalisi tersebut juga sudah dilanda oleh beberapa konflik internal dalam *Koalisi*.

Pengunduran diri Mahathir sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh banyak orang khususnya masyarakat Malaysia. Mahathir sebelumnya pernah mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai seorang Perdana Menteri, namun akan memberikan jabatannya kepada Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim setelah Mahathir menyelesaikan beberapa tugas. Walaupun Mahathir tidak pernah menyebutkan secara jelas kapan dirinya akan memberikan jabatannya kepada Anwar. Namun, Mahathir pernah berkata bahwa dirinya akan menyampaikan keputusannya setelah Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik yang akan dilaksanakan pada bulan November 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia (Lallt, 2020). Namun, belum sampai pada Konferensi tersebut Mahathir sudah meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri, keputusan Mahathir tersebut sontak membuat banyak pihak terkejut dan bertanya-tanya mengapa Mahathir mempercepat pengunduran dirinya sebagai seorang Perdana Menteri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Mahathir Mohammad mempercepat pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia?

C. Kerangka Teori

Tulisan ini akan menggunakan konsep konflik dan teori stabilitas politik sebagai kerangka penelitiannya. Penulis menggunakan kedua konsep tersebut karena kedua konsep tersebut menyediakan kerangka berpikir dan penelitian yang relevan dengan isu yang akan diteliti. Pengunduran diri seorang perdana menteri sebelum akhir masa jabatannya tentunya tidaklah jauh dari adanya proses politik. Hal itu dapat disebabkan karena adanya banyak alasan maupun faktor. Dalam kasus Mahathir, secara garis besar kondisi politik yang terjadi dapat oleh adanya proses komunikasi politik internal koalisi maupun partai. Selain itu, kasus Mahathir tidaklah jauh dengan adanya konflik, karena politik sangatlah dekat kaitannya dengan adanya konflik, entah dalam bentuk perbedaan pendapat ataupun perebutan kekuasaan.

1. Konsep Konflik

Konflik, berasal dari bahasa Latin, yaitu; *configere*, yang berarti saling memukul. Dari sini kita dapat mengartikan konsep “konflik” dengan berbagai macam artian. Namun, secara sosiologi konflik diartikan sebagai sebuah “kondisi”, dimana salah satu pihak (individu atau kelompok) berusaha menjatuhkan pihak yang lainnya dengan cara menghancurkan, atau membuatnya tidak berdaya.

Di tengah perkembangan zaman, definisi mengenai konflik juga bermunculan dengan berbagai macam bentuk serta penjelasan. Berikut adalah definisi konflik dari beberapa ahli:

1. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
2. Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi

memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

3. Menurut Robbin (1996), keberadaan konflik dalam organisasi dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.
4. Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Myers,1982:234-237; Kreps, 1986:185; Stewart, 1993:341) (Konsep Dasar Konflik).

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah sebuah kondisi dimana terdapat pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat konflik dikarenakan adanya perbedaan kepentingan/pendapat, perbedaan nilai-nilai yang dianut, serta karena adanya kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dan pihak-pihak tersebut mengakui bahwa konflik memang sedang terjadi di tengah mereka.

Konflik bisa timbul karena adanya situasi yang menunjukkan adanya ketidakselarasan tujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya, maupun keengganan untuk melebur dengan pihak lainnya sebagai akibat dari adanya keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Keterbatasan sumber daya tersebut kemudian memunculkan adanya **sikap** (aspek-aspek kognitif) yang dapat memicu konflik dari masing-masing pihak yang berkonflik, sikap tersebut dapat berupa: rasa benci, agresif, menganggap pihak lain sebagai musuh, ketegangan pribadi maupun kelompok.

Kemudian **sikap** tersebut dimanifestasikan dalam bentuk **perilaku** yang dapat memicu konflik di kehidupan “nyata”. **Perilaku** tersebut dapat berupa adanya perkataan ataupun tindakan dari masing-masing pihak yang berkonflik yang dapat merusak hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik sehingga bisa saja menimbulkan perpecahan antara masing-masing pihak yang berkonflik.

Melalui konsep konflik, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana sejatinya konflik yang dialami oleh Mahathir menjelang pengunduran dirinya, dan bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi keputusan Mahathir untuk mempercepat proses pengunduran dirinya. Setelah sebelumnya

Mahathir mengatakan bahwa dirinya hanya akan memutuskan kapan dia mundur setelah KTT APEC pada bulan November 2020, namun pada kenyataannya Mahathir mengundurkan diri pada 24 Februari 2020.

2. Teori Stabilitas Politik

Sebelum mengenal lebih jauh mengenai apa itu “stabilitas politik”, tulisan ini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu “politik”. Sebenarnya ada berbagai macam pendefinisian atas konsep politik. Hal tersebut diakibatkan karena berbagai pencetus teori hanya melihat atau memfokuskan diri kepada satu dari berbagai macam komponen politik (negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian). Namun, jika dilihat secara menyeluruh dengan memasukkan segala komponen kedalam pendefinisiannya, politik diartikan sebagai usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan kekuasaan sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyalurkan berbagai macam nilai dan kebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam praktiknya, khususnya pada dewasa ini, tidak hanya satu atau dua pihak saja yang mengincar kekuasaan dalam proses politik. Terlebih pada negara demokrasi, berbagai macam partai politik dibentuk untuk diikutsertakan dalam pemilu. Hal itu ditujukan demi mendapatkan kekuasaan yang dapat digunakan untuk

membuat kebijakan dan menyebarkan nilai-nilai yang dianggap dapat membantu meraih tujuan para kontestan. Hasilnya, para kontestan mengerahkan segala upaya yang dimiliki untuk memenangkan pemilu (Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2007).

Sedangkan, stabilitas politik diartikan sebagai “keadaan” dimana proses pembagian nilai dan kebijakan oleh pemerintahan kepada masyarakat berjalan dengan efektif dan lancar tanpa adanya kendala, disertai dengan adanya pemberian legitimasi dari masyarakat kepada pemerintah apabila masyarakat merasa kebutuhannya terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, ada dua hal yang dapat digunakan untuk mengukur stabil atau tidaknya politik pada sebuah negara. *Pertama*, stabilitas politik dapat diukur dengan adanya efektifitas pembagian kebijakan. Apabila sebuah kebijakan atau nilai yang diberikan pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa adanya penolakan secara keras, maka proses politik dalam negeri tersebut tergolong stabil. Namun sebaliknya, apabila proses pendistribusian kebijakan oleh pemerintah kepada masyarakat terkendala oleh penolakan dan semacamnya maka keadaan politik di sebuah negara tidak dapat dianggap stabil (Ake).

Kedua, stabil tidaknya politik sebuah negara dapat diukur dengan bagaimana legitimasi yang dimiliki oleh pemerintahan

pada sebuah negara. Legitimasi adalah sebuah bentuk “kepercayaan atas hak untuk memerintah” dari masyarakat kepada pemerintah. Ketika rakyat percaya dan siap melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat kepada pemimpin, maka semakin tinggi pula legitimasi pemimpin tersebut. Namun, tingginya legitimasi juga tidak terlepas dari bagaimana sebuah pemerintahan melayani masyarakatnya, semakin baik pemerintahan melayani dan memberikan keadilan maka semakin tinggi pula legalitas pemerintahan tersebut. Sebaliknya, apabila sebuah rezim pemerintahan melanggar “ketidakadilan dan keburukan” maka pemerintahan tersebut semakin tidak memiliki legalitas politik (Sahide, 2019).

Teori stabilitas politik ini menjadi salah satu landasan untuk melihat alasan sebenarnya Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Bagaimana sebenarnya dinamika politik di Malaysia, bagaimana cara pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu mendapatkan kemenangan, dan bagaimana semua itu berpengaruh kepada Mahathir, bahkan hingga menjadi alasan mengapa Mahathir mempercepat pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri.

D. Hipotesa

Dari pemaparan yang telah disajikan di atas, dapat ditarik dugaan sementara bahwa mundurnya Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri Malaysia adalah disebabkan karena adanya konflik internal pemerintahan Malaysia antara Mahathir dengan partainya di koalisi *Pakatan Harapan*, dan adanya keengganan dari Mahathir untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Anwar Ibrahim.

E. Tujuan Penulisan

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengetahui alasan mengapa Mahathir Mohammad mengundurkan diri sebagai perdana menteri Malaysia pada tahun 2020.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan mengenai alasan mengapa Mahathir Mohammad mempercepat pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2020. Dimulai dengan mencari data yang berhubungan pengangkatan Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2018, hingga pengunduran Mahathir sebagai Perdana Menteri pada awal tahun 2020. Selain itu, penelitian ini akan membantu mencari tahu dan menjelaskan faktor apa

yang membuat Mahathir mengundurkan diri. Kaitannya dengan konsep konflik dan politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Krishnarao (1961) penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala atau fakta-fakta kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai populasi atau daerah tertentu (Sutresna).

Jenis penelitian deskriptif dipilih oleh penulis untuk mencari dan menguraikan alasan Mahathir Mohammad mempercepat pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2020.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam mengenai masalah yang di teliti. Penulis menggunakan data sekunder berupa jurnal, berita online, media online, dan berbagai sumber data sekunder lainnya untuk mencari tahu

alasan Mahathir Mohammad memepercepat pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2020.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini terdiri dari lima bab dengan berbagai sub-bab pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan: latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II

Biografi Mahathir Mohammad, terpilihnya Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2018.

BAB III

Tentang pemilu Malaysia tahun 2018, jumlah parpol, sistem pemilu, dan hasil perolehan suara dan isu pemilu.

BAB IV

Menguraikan alasan mengapa Mahathir Mohammad mempercepat pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia.

BAB V

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi.